



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 95 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0114 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban Perangkat Daerah pada pelaksanaan kinerja dalam satu tahun yang disusun setiap akhir tahun anggaran sebagai laporan kinerja Tahunan. Dengan Laporan Kinerja Tahunan dapat diketahui sejauh mana hasil pencapaian kinerja suatu Perangkat Daerah dibandingkan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu juga laporan kinerja tahunan tersebut sebagai informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk tahun yang akan datang. Disamping itu juga, laporan tahunan diperuntukkan memenuhi keterbukaan informasi publik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan urusan pemerintahan wajib dibidang penanaman modal dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang tersusun dalam program, kegiatan operasional yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Dana Dekonsentrasi yang bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Pada tahun anggaran 2022 sebelum perubahan dialokasikan dana sebesar **Rp15.411.761.292,00** dan setelah perubahan dialokasikan sebesar **Rp15.552.201.092,00** terdiri dari:



- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, dengan kegiatan:
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut :
 - ✚ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ✚ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut
 - ✚ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ✚ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - ✚ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut
 - ✚ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - ✚ Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - ✚ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut
 - ✚ Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ✚ Penyedia Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - ✚ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ✚ Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan
 - ✚ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - ✚ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut
 - ✚ Pengadaan Mebel
 - ✚ Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
 6. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut
 - ✚ Penyediaan Jasa surat Menyurat



- ✚ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ✚ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
- 7. Pemerliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut
 - ✚ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - ✚ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - ✚ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
- b. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL, dengan kegiatan:
 - 1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut :
 - ✚ Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - ✚ Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - 2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut :
 - ✚ Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
 - ✚ Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
- c. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL, dengan kegiatan:
 - 1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan Sub. Kegiatan sebagai berikut:
 - ✚ Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
 - ✚ Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi



- d. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL, dengan kegiatan:
- a. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut:
 - + Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - + Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - + Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
 - + Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
 - e. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL, dengan kegiatan:
 1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - + Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - + Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - + Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - f. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL, dengan kegiatan:
 - a. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik



BAB II

GAMBARAN UMUM

A. FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 043 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk sebagai Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

1. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas pokok mengkoordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan fungsi:

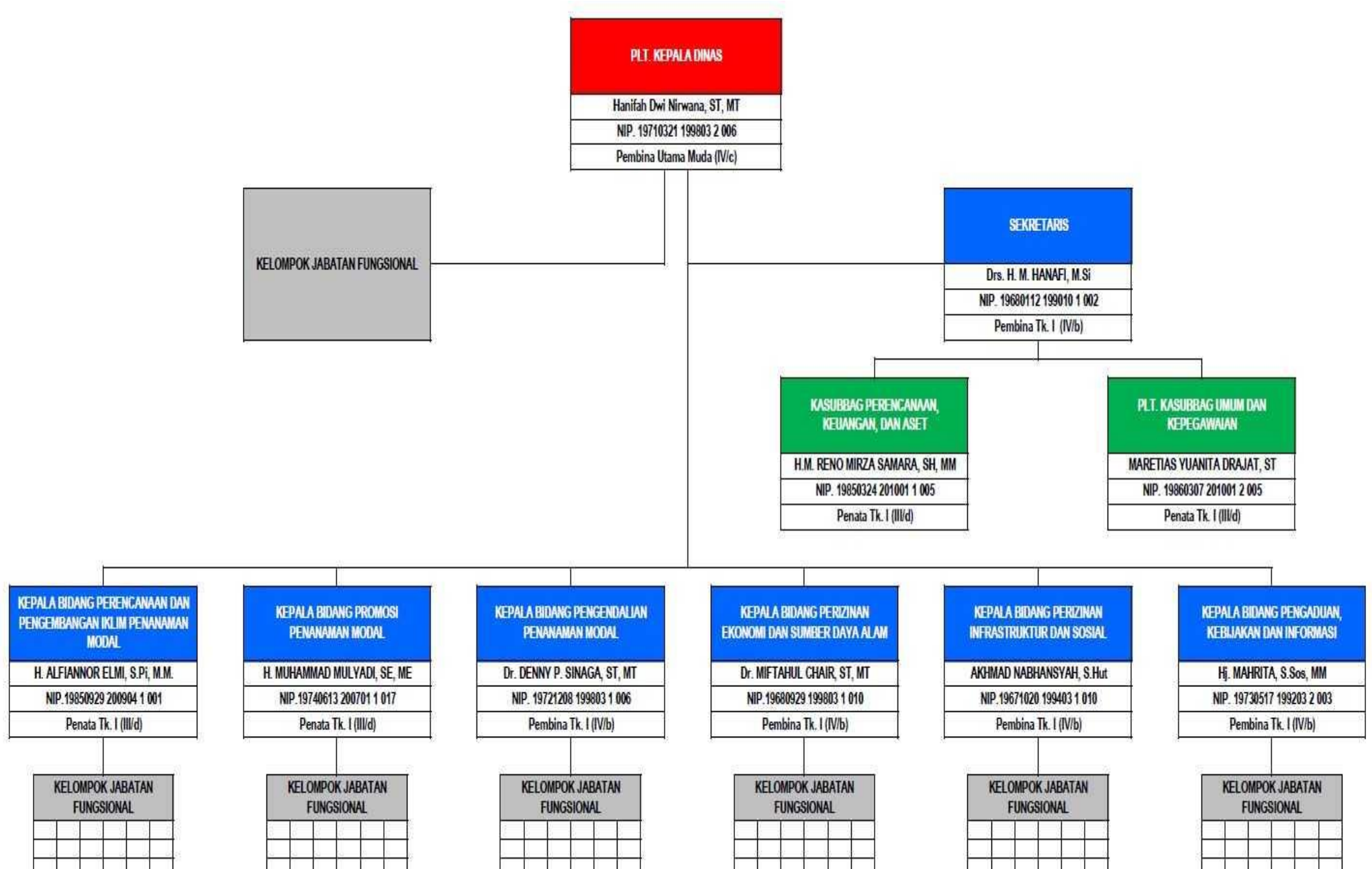
- a. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal
- c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal
- d. Koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
- e. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam
- f. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan infrastruktur dan sosial
- g. koordinasi pelaksanaan pelayanan pengaduan, kebijakan dan informasi; dan
- h. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.



3. Struktur Organisasi

Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terorganisasi dalam struktural jabatan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 - b. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
4. Bidang Promosi Penanaman Modal
5. Bidang Pengendalian Penanaman Modal
6. Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
7. Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial
8. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi:
9. Kelompok Jabatan Fungsional.





B. KEPEGAWAIAN

Sumberdaya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan kedalam jenjang minimal SD atau Sekolah Dasar dan jenjang paling puncak yaitu jenjang Serjana S2. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di tabel 2.1.

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	2	3	4	5	6
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-	-	
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	-	-	-	
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	6	1	7	
4	Diploma Satu (D-I)	-	-	-	
5	Diploma Dua (D-II)	-	-	-	
6	Diploma Tiga (D-III)	2	2	4	
7	Diploma Empat (D-IV)		-		
8	Sarjana (S-1)	8	6	14	
9	Sarjana (S-2)	8	4	12	
10	Sarjana (S-3)	2	-	2	
	Jumlah PNS	26	13	39	
1.	Sekolah Dasar (SD)	3	-	3	
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	-	2	
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	11	-	11	*)
4.	Diploma (D-3)	2	-	2	
5	Sarjana (S-1)	12	11	23	*)
	Jumlah Non PNS	28	13	41	
	Jumlah Seluruh Karyawan DPMPTSP	54	26	80	

Keterangan : *) Pegawai Tenaga Kontrak



Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 39 (Tiga puluh sembilan) orang kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan sebagaimana tercantum pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	2	3	4	5	6
1	II/a Pengatur Muda	-	-	-	
2	II/b Pengatur Muda Tk.I	-	-	-	
3	II/c Pengatur	2	2	4	
4	II/d Pengatur Tk.I	5	-	5	
5	III/a Penata Muda	1	2	3	
6	III/b Penata Muda Tk.I	2	2	4	
7	III/c Penata	4	3	7	
8	III/d Penata Tk.I	5	4	9	
9	IV/a Pembina	2	-	2	
10	IV/b Pembina Tk.I	5	-	5	
11	IV/c Pembina Utama Tk.I	-	-	-	
12	IV/d Pembina Utama	-	-	-	
	JUMLAH	26	13	39	

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Struktural dan Fungsional	Jumlah		Total
		L	P	
1	2	3	4	5



1	Eselon I	-	-	-
2	Eselon II.A	1	-	1
3	Eselon III.A	7	-	7
4	Eselon IV.A	2	-	2
5	Fungsional Tertentu	7	3	10
6	Non Struktural / Fungsional Umum	9	10	19
	Jumlah	26	13	39

B. SARANA, PRASARANA DAN ASET

Kondisi sarana dan prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan Desember tahun 2022 disajikan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4

Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah	Kondisi Barang		Keterangan
			Rusak	Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Gedung Kantor	1 unit		1 unit	
2	Gedung Pos Jaga	1 Unit		1 Unit	
3	Gedung Garasi Pool	4 Unit		4 Unit	
2	Mobil Dinas Roda 4 (Innova, Avanza, Suzuki R-3)	12 Buah		12 Buah	4 Dari Pemprov, 8 Langsung
3	Sepeda Motor (Vixion, CBR, Supra, Vario dan Beat)	11 Buah		11 Buah	Pengadaan Langsung
4	Perkakas Bengkel Listrik (Mesin Generator)	1 Buah		1 Buah	
5	Perkakas Pengangkat bermesin lainnya	1 Buah		1 Buah	
5	Alat Pemeliharaan Tanaman	1 Buah		1 Buah	Mesin Pemotong Rumput
6	Mesin Ketik	7 Buah	1 Buah	6 Buah	
7	Alat Reproduksi Pengadaan (Mesin Fotocopy)	4 Buah		4 Buah	
8	Alat Penyimpanan	118 Buah	11 Buah	107 Buah	



No	Jenis Perlengkapan	Jumlah	Kondisi Barang		Keterangan
			Rusak	Baik	
1	2	3	4	5	6
9	Alat – Alat Kantor Lainnya	16 Buah		16 Buah	
10	Alat Rumah Tangga (Meubelair)	174 Buah	2 Buah	2 Buah	
11	Alat Rumah Tangga (Alat Pengukur Waktu)	12 Buah		12 Buah	
12	Alat Rumah Tangga (Alat Pembersih)	2 Buah		2 Buah	
13	Alat Rumah Tangga (Alat Pendingin)	49 Buah	7 Buah	42 Buah	(A.C Split dan Lemari ES)
14	Alat Rumah Tangga (Alat Dapur)	8 Buah		8 Buah	
15	Alat Rumah Tangga (Home Use)	68 Buah	8 Buah	60 Buah	
16	Meja Kerja Pejabat	99 Buah	26 Buah	73 Buah	
17	Meja Rapat Pejabat	11 Buah		11 Buah	
18	Kursi Kerja Pejabat	108 buah	2 Buah	106 Buah	
19	Kursi Rapat Pejabat	25 Buah		25 buah	
20	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	2 Buah		2 Buah	
21	Lemari dan Arsip Pejabat	50 Buah		50 Buah	
22	Peralatan Studio Audio	72 Buah	3 Buah	69 Buah	
23	Peralatan Studio Audio dan Film	5 Buah		5 Buah	



BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN URUSAN PENANAMAN MODAL

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dengan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan. Total anggaran untuk Belanja Langsung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 sebesar ***Rp15.411.761.292,00,- (lima belas milyar empat ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)*** kemudian setelah perubahan dialokasikan dana sebesar ***Rp15.552.201.092,00, (lima belas milyar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus satu ribu Sembilan puluh dua rupiah)***.

Realisasi pelaksanaan kegiatan dengan anggaran tersebut adalah sebesar ***80.55% atau Rp12.527.647.309,00- (dua belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus Sembilan rupiah)***.

Adapun rincian dan penjelasan pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar ***Rp178.612.600***. Serapan keuangan sebesar ***Rp120.031.100*** atau 67.20% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Kinerja sesuai ketentuan sebanyak 3 Dokumen yaitu :

- Rencana Kerja (RENJA) tahun 2023



- Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) 2022
- Draft Rencana Strategi (RENSTRA) 2021-2026

2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp185.267.500,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp154.691.350,-** atau 83.50% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Kinerja sesuai ketentuan sebanyak 3 Dokumen yaitu:

- Laporan Tahunan 2021
- LKPJ/LPPD 2021
- LAKIP 2021

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp7.231.086.700,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp5.759.271.972,-** atau 79.65% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang selama 14 bulan.

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp226.981.300,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp156.218.000,-** atau 68.82% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah jasa administrasi keuangan (PPK SKPD, KPA SKPD, Pembantu PPK SKPD (PPTK, PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pengurus/ Penyimpan Barang, Pengurus Gaji, Pembuat Dokumen, Pencatat Pembukuan, dan Petugas Entry) untuk keperluan administrasi perkantoran selama 1 tahun.

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp12.284.500,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp11.812.600,-** atau 96.16% dengan realisasi fisik



sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya pelaporan keuangan dan akuntansi (semesteran dan tahunan).

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp34.591.000,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp19.796.200,-** atau 57.23% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah yakni persentase peserta pelatihan/bimtek yang paham sebesar 100% sebanyak 9 peserta.

✚ Pelatihan PPRG di Hotel Roditha Banjarmasin tanggal 16 s/d 17 September 2021 sebanyak 2x @ 2 Orang = 4 Orang

✚ Bimbingan Teknis Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Bidang Penyelenggaraan Bangunan Gedung tanggal 27 s/d 28 September 2021 sebanyak 2 orang

✚ Bimbingan Teknis Peningkatan Bangunan Gedung di Hotel Mercure Banjarmasin tanggal 28 s/d 29 September 2021 sebanyak 2 orang

✚ Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di hotel Mercure tanggal 30 September 2021 sebanyak 1 orang

✚ Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V dan VI tahun 2021 di kampus graha panglima batur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 21 s/d 25 September 2021 sebanyak 10 orang

2. Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp21.408.000,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp15.160.000,-** atau 70.81% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan jumlah peserta 204 orang.



- Pada hari kamis 16 desember 2021 diadakan rapat sosialisasi pembangunan zona integritas tahun 2021 di aula dpmptsp prov.kalsel untuk 74 orang
- Pada hari jumat 17 desember 2021 diadakan rapat sosialisasi pelayanan publik tahun 2021 di aula dpmptsp prov kalsel untuk 52 orang

3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp35.041.000,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp450.000,-** atau 1.28% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp34.397.500,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp33.845.000,-** atau 98.39% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp86.993.600,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp86.277.000,-** atau 99,18% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah alat tulis kantor.
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp324.430.400,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp321.780.000,-** atau 99.18% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya bahan logistik kantor.
4. Penyediaan Bahan Cetakan dan Pengadaan Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp55.998.500,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp55.997.900,-** atau 99,99% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianyan bahan cetakan dan pengadaan.



5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp139.512.000,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp134.279.350,-** atau 99.83% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk keperluan kantor dan tersedianya 1 orang Pengadministrasi Umum, 1 orang Pengelola Data dan 1 orang Pengelola Perpustakaan yang difasilitasi jaminan sosial kesehatan (BPJS) non PNS selama 1 tahun.

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp814.917.000,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp518.703.950,-** atau 63.65% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Mebel

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp82.000.000,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp81.868.000.000,-** atau 99,84% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya jumlah aset yang disediakan sebanyak 38 Buah.

Tabel. Pengadaan Mebel

No	Nama	Spesifikasi	Unit
1	Kursi Rapat	Kursi Hadap Informa Councili Hitam	<u>32</u>
2	Kursi Pejabat	Kursi manager Informa Councili sandaran Rendah Hitam	<u>6</u>

2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp182.651.600,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp175.836.000,-** atau 96.27% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya jumlah aset yang disediakan sebanyak 14 unit.



Tabel. Pengadaan peralatan & mesin kantor

No	Jenis	Jumlah
1	Laptop	<u>1</u>
2	PC	<u>6</u>
3	Printer	<u>3</u>
4	Dispenser	<u>2</u>
5	Mesin Pemotong Rumput	<u>1</u>
6	Proyektor	<u>1</u>

g. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyedia Jasa Surat Menyurat

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp15.935.000,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp15.160.900,-** atau 95.14% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa surat menyurat selama 1 tahun.

2. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp498.000.000,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp411.931.729,-** atau 82.72% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa komunikasi dan internet, air, dan listrik untuk keperluan kantor selama 1 tahun.

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp522.753.500,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp460.700.850,-** atau 88,13% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa pihak ketiga untuk keamanan dan kebersihan kantor serta alat-alat kebersihan untuk keperluan kantor selama 1 tahun dan tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu selama 11 bulan.



h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp324.802.000,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp275.609.711,-** atau 84.85% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun dan tersedianya 3 orang pengemudi (Supir) yang difasilitasi jaminan sosial kesehatan (BPJS) non PNS selama 1 tahun.

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp426.337.492,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp424.993.397,-** atau 99,68% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun, serta tersedianya 3 orang petugas keamanan kantor (SATPAM) yang difasilitasi jaminan sosial kesehatan (BPJS) non PNS selama 1 tahun.

1. Pengerjaan Paving Blok

Kegiatan ini mempunyai beberapa tahapan yakni di mulai dari kegiatan perencanaan paving blok, pengerjaan paving blok dan pengawasan paving blok dengan rincian sebagai berikut :

a. Perencanaan Paving Blok

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 198.972.147,-

Maksud pengadaan jasa konsultansi Konsultan Perencanaan Paving Blok ini adalah untuk mendapatkan perencanaan yang detail untuk memperlancar pembangunan dan penataan paving blok menjadi lebih terarah dan tepat sasaran.



Tujuan pengadaan jasa konsultasi Konsultan Perencanaan Paving Blok ini untuk mendapatkan arahan detail dalam usaha pelaksanaan penataan halaman kantor.

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan jasa konsultasi adalah mendapatkan Perencanaan Detail Konsultan Perencanaan Paving Blok pada halaman kantor DPMPTSP Prov Kalimantan Selatan.

b. Pelaksanaan Paving Blok

- Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-
- Maksud Pengerjaan Paving Blok ini sebagai upaya meningkatkan infrastruktur jalan, sehingga dapat digunakan oleh pengguna/aparatur negara.
- Tujuan Pengerjaan Paving Blok ini adalah agar dapat mengoptimalkan sarana jalan kantor tersebut.
- Target/Sasaran Pengerjaan Paving Blok ini adalah untuk mengoptimalkan sarana jalan tersebut agar dapat digunakan dengan maksimal oleh pengguna/aparatur negara, serta untuk tercapainya program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

c. Pengawasan Paving Blok

- anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-
- Maksud Pengerjaan Paving Blok ini sebagai upaya meningkatkan infrastruktur jalan kantor, sehingga dapat digunakan oleh pengguna/aparatur negara.



- Tujuan Pengerjaan Paving Blok Paving ini adalah agar dapat mengoptimalkan sarana jalan kantor tersebut.
- Target/Sasaran Pengawasan Pengerjaan Paving Blok ini adalah untuk mengoptimalkan pekerjaan yang dilakukan kontraktor pelaksana serta untuk tercapainya program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor

Kegiatan ini ada kegiatan rutin pemeliharaan gedung kantor yang terdiri dari :

- a. Pekerjaan Pemeliharaan seperti Pemeliharaan Gedung (Pekerjaan Instalasi Listrik AC Standing, Instalasi AC Ruang Mushola dan Pemeliharaan Toilet Kantor kantor DPMPTSP Prov. Kalsel
- b. Pekerjaan Perbaikan Dak/Atap
- c. Pekerjaan Perbaikan Plafon
- d. Pengecatan Dinding Lama

3. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp147.150.000,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp145.223.500,-** atau 98.69% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan performance ruang kantor dan fasilitas lainnya sebagai penunjang peningkatan kinerja aparatur.

Target/Sasaran pekerjaan Perbaikan Ruangan Pejabat dan Ruang Eselon II ini adalah sebagai berikut :



1. Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
2. Pemasangan Baru dan Pemasangan Instalasi Listrik
3. Pemasangan Baru dan Perbaikan Instalasi Listrik
4. Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi Printer
5. Pemeliharaan Inventaris Kantor
6. Pemeliharaan Genset (Genset lebih kecil dari 50 KVA)
7. Pemeliharaan Mesin Fotocopy
8. Pemeliharaan Alat pendingin
9. Pemeliharaan Alat Studio atau Audio
10. Pemeliharaan CCTV
11. Pemeliharaan Personal Computer/INotebook

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan kegiatan:

- a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, sub kegiatan:

1. Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp229.504.100,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp146.538.750,-** atau 63.85% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan:

A. Kegiatan Perjalanan Luar Daerah

➤ **(Jakarta) 8 – 10 April 2021**

Kemendagri – RI Jakarta : Undangan Asistensi dan Supervisi dalam Penyederhanaan Regulasi dan Penanaman Modal di Daerah Melaksanakan Promosi dan Kemudahan Berusaha bagi UMKM.

Kegiatan Asistensi dan Supervisi dalam Penyederhanaan Regulasi dan Penanaman Modal di Daerah dalam Melaksanakan Promosi dan Kemudahan Berusaha bagi UMKM, dihadiri oleh 37 Perwakilan Provinsi dan diwakili



oleh Dinas PMPTSP dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi se Indonesia pada kegiatan ini dibuka oleh Direktur PEIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri R. Budiono Narasumber dari Asisten Deputi Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Beliau memaparkan Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sinergitas perencanaan dengan Pelaksanaan
2. Konsolidasi antar kementerian dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UMKM. Terutama dalam meningkatkan kecintaan produk UMKM dengan “Gerakan Nasional Cinta Produk UMKM”
3. Mendorong Pemda dalam membuat database UMKM.

➤ **D.K.I Jakarta (Jakarta Pusat) Tgl 24 -26 November 2021 :**
Kegiatan Matchmaking / Undangan Forum Investasi Kalimantan Selatan 2021

Pada sebelumnya acara Forum Investasi Kalimantan Selatan 2021 ini di buka oleh Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor yang diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bapak Syaiful Azhari. Melalui sambutannya beliau mengatakan bahwa daerah Kalimantan Selatan ini seperti kepingan surge di tanah Borneo yang di anugrahi oleh kekayaan alam dan letak wilayah yang strategis. Pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan semuanya tersedia di Kalsel. Secara geografis banua juga berada di wilayah strategis karena berada di tengah-tengah Indonesia. Keunggulan geografis ini semakin lengkap dengan pemindahan Ibu Kota Negara baru di Kaltim dan Food Estate di Kalteng. Kalsel berada di posisi sentral dari dua proyek nasional itu, dengan demikian potensi



investasi akan beragam lagi. Saat peresmian Biodiesel beberapa waktu lalu, pihaknya juga mengusulkan agar kawasan Khusus Ekonomi Batulicin dan Jalan Lintas Banjarbaru-Tanah Bumbu menjadi Proyek Strategis Nasional. Infrastruktur pendukung juga disiapkan secara matang baik pelabuhan, bandara maupun konektivitas transportasi darat dan sungai. Untuk itu Gubernur Kalimantan Selatan mengajak para investor untuk berinvestasi di Kalsel karena InsyaAllah kita akan menuai hasil yang sama-sama menguntungkan.

Pada acara Forum Investasi Kalimantan Selatan kali ini juga dilakukan kegiatan matchmaking yaitu penandatanganan MoU kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM. Sesuai dengan amanah UU. No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, dimana Perusahaan-perusahaan diminta dapat bermitra dengan pelaku UMKM di daerah. Penandatanganan MoU kemitraan ini antara perusahaan besar yaitu PT. Adaro Energy dan PT. Jhonlin Grup dengan perwakilan pelaku UMKM Kalimantan Selatan yaitu Ibu Dr. Iswiyati Rahayu, M.Si., yang disaksikan dan diketahui oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan. Harapannya penandatanganan MoU ini dapat memicu perusahaan-perusahaan besar lain yang ada di Indonesia juga melakukan kemitraan dengan pelaku UMKM di Kalimantan Selatan sehingga berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi di Banua.

- **Kota Bandung (Provinsi Jawa Barat) 9-10 Desember 2021 :**
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara DPMPTSP Provinsi Jawa Barat dengan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan



Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Provinsi Jawa barat dengan Provinsi Kalimantan selatan, tentang peningkatan Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Ir. H. Nafarin, MP menghadiri pertemuan dengan Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Jawa Barat Ibu Noneng Komara Nengsih SE, MAP. Penandatanganan kerjasama ini dilakukan di gedung WJIHub. Dinas DPMPTSP Provinsi Jawa Barat pada tanggal 09 Desember 2021 dan disaksikan langsung oleh pejabat dari Kementerian Investasi / BKPM RI, ibu Septian Christina, ST, MAB selaku Direktur Pemantuan Kepatuhan Perizinan Berusaha.

Adapun rencana aksi yang termuat dalam perjanjian kerjasama tersebut antara lain :

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, meliputi kegiatan Inventaris potensi dan peluang penanaman modal untuk ditawarkan dan dikerjasamakan, tukar menukar informasi dalam kemudahan berusaha, tukar menukar potensi dan peluang penanaman modal di masing-masing daerah, pelaksanaan pertemuan/matchmaking antar pelaku usaha;
2. Bidang Promosi Penanaman Modal, meliputi kegiatan promosi di dalam dan di luar negeri, tukar menukar informasi investment intelligence, tukar menukar informasi kerja sama luar negeri yang telah dilaksanakan oleh masing-masing daerah, dan pembuatan leaflet serta booklet bersama;
3. Bidang Peningkatan Pelayanan dan Perizinan Penanaman Modal, meliputi kegiatan tukar menukar informasi serta



kerja sama tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di luar aplikasi OSS, dan lain-lain;

4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, meliputi kegiatan tukar menukar informasi dalam memfasilitasi perusahaan penanaman modal terhadap permasalahan yang dihadapi;
5. Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan kegiatan Peningkatan wawasan/kapasitas sumber daya manusia di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melalui program pelatihan, magang dan bimbingan teknis.
6. Pembuatan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan Pembuatan dan pengembangan aplikasi sebagai pengolah data, media promosi, serta pelayanan perizinan dan non perizinan, Studi banding dan bimtek bersama dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan pengelolaan data dan informasi serta Studi banding peningkatan kapasitas terhadap layanan pengaduan dan tindak lanjut Layanan Publik.

➤ **Kota Surabaya (Prov. Jawa Timur) 21-23 Desember 2021 :**

Kegiatan Matchmaking / Undangan Evaluasi Kerjasama Bidang Penanaman Modal dan Rencana Kerja Bersama TA 2022

Kegiatan evaluasi pelaksanaan KSD antar provinsi dan Matchmaking/kemitraan dunia usaha ini dihadiri oleh Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Timur yang diwakilkan oleh Plt. Sekretaris Bapak Kus Adiyanto, dengan ditemani oleh Kepala Bidang Penanaman Modal dan Kepala Seksi Perizinan Pembangunan. Untuk Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan



Selatan diwakilkan oleh Plt. Sekretaris Bapak M. Hanafi, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM, Bapak M. Ilman Rizekan yang didampingi oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Kebijakan PM dan Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha, serta satu orang perwakilan dari UMKM.

- DKI Jakarta Tanggal 15 -17 Juni 2021 Pemberian Insentif/ Kemudahan PM

B. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Perjalanan dalam Daerah Identifikasi dan Monitoring Kerja sama/ Kemitraan/ Macthmaking PPU di 13 Kab Kota

- Kota Banjarmasin
- Kota Banjarbaru
- Kab. Banjar
- Kab. Barito Kuala
- Kab. Tapin
- Kab. Tanah Laut
- Kab. Tanah Bumbu
- Kab. Kotabaru
- Kab.Hulu Sungai Selatan
- Kab Hulu Sungai Utara
- Kab Hulu Sungai tengah
- Kab. Balangan
- Kab. Tabalong

C. Terlaksananya alat tulis kantor selama 1 tahun.

D. Rakor Macthmaking/Kemitraan di Hotel Nasa Banjarmasin Tanggal 31 Maret 2021 dan Hotel HBI tanggal 16 November 2021

F. Terlaksananya Kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) Kebijakan Daerah Terhadap Pemberian Insentif Penanaman



Modal Bagi Pelaku UMKM Tanggal 07 Desember 2021 bertempat di Aula Mall Pelayan Publik Tabalong , Yang di hadiri 50 peserta DPMPTSP kabupaten / kota se Kalimantan Selatan. Dengan Anggaran Rp. 9.504.000

Hasil Kegiatan : Pemerintah memperpanjang pemberian insentif pajak hingga 30 Juni 2021. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 / PMK.03/2021 yang berlaku sejak 1 Februari 2021.

2. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp36.302.300,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp31.262.400,-** atau 86.12% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya 1 (satu) dokumen evaluasi selama 1 tahun.

1. Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun.
2. Tersedianya buku dari Hasil Evaluasi pemberian insentif / kemudahan PM
3. Terlaksananya evaluasi pemberian insentif /kemudahan ke DPMPTSP se Kalimantan Selatan dengan Output Data dan informasi hasil pemberian insentif /kemudahan ke DPMPTSP se Kal.Sel, masih ada yang belum melaksanakan PP No. 24 Tahun 2019. yakni:

- ☐ Kota Banjarmasin tanggal 21 Mei 2021
- ☐ Kabupaten Barito Kuala tanggal 24 Mei 2021
- ☐ Kabupaten Tanah Laut tanggal 4 Juni 2021
- ☐ Kabupaten Kotabaru tanggal 14 s.d 16 Juli 2021
- ☐ Kabupaten HSS tanggal 22 Juli 2021
- ☐ Kabupaten HSU tanggal 26 s. d Juli 2021
- ☐ Kabupaten HST tanggal 5 s. d 6 Agustus 2021
- ☐ Kabupaten Balangan tanggal 19 s.d 20 Agustus 2021



- ☐ Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 7 s.d 8 Juni 2021
Sudah membuat Perda Tentang Pemberian Insentif & Kemudahan Investasi di Daerah.
- ☐ Kabupaten Tapin tanggal 7 Juli 2021
Lagi dalam proses pembuatan Perda Tentang Pemberian Insentif & Kemudahan Investasi di Daerah.
- ☐ Kota Banjarbaru & Kabupaten Banjar tanggal 31 Mei 2021
Lagi dalam proses pembuatan Perwali & Perda Tentang Pemberian Insentif & Kemudahan Investasi di Daerah.
- ☐ Kabupaten Tabalong tanggal 26 s.d 27 Agustus 2021
Sudah membuat Perda Tentang Pemberian Insentif & Kemudahan Investasi di Daerah.

b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp37.409.000,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp33.433.500,-** atau 89.37% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya persentase kesesuaian RUPM dengan sektor investasi sebanyak 8 sektor selama selama 1 tahun.

1. Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun.
2. Tersedianya buku dari hasil evaluasi RUPM Kab/kota
3. Tersedianya buku dari hasil pemutakhiran data dan pemetaan investasi

2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp153.160.500,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp133.947.500,-** atau 87.46% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya jumlah potensi investasi daerah yang teridentifikasi sesuai standar sebanyak 1 dokumen selama selama 1 tahun.



1. Tersedianya alat tulis kantor dengan outcome Meningkatnya kelancaran kegiatan perencanaan & kebijakan penanaman modal selama 1 tahun
2. Tersedianya 1 (satu) orang Tenaga Kontrak Kegiatan dengan Klasifikasi Pengadministrasian Umum yang difasilitasi jaminan sosial kesehatan (BPJS) selama 1 (satu) Tahun.
3. Terlaksananya Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah rangka Menghimpun Data Potensi Daerah Kab / Kota ke DPM PTSP Kab/ Kota se Kal.Sel sebanyak 13 kali kegiatan yakni:
 - Kota Banjarbaru & Kabupaten Banjar tanggal 08 Februari 2021
Potensi investasi : Aero City, TPA Regional Banjarbakula, embung guntung Payung & Embung Sidodadi, Geopark
 - Kabupaten Tanah Laut tanggal 10 Februari 2021
Potensi investasi : Peternakan Sapi Potong, Kawasan Industri Jorong, PLTB, Wisata Air Terjun Bajuin, Wisata Alam Riam Adungan Kintap.
 - Kota Banjarmasin tanggal 15 Februari 2021
Potensi investasi Pariwisata Susur Sungai, Kawasan Pergudangan Lingkar Selatan, Pusat Distribusi Regional Baiman, Kawasan Industri Terpadu Mantuil, Waste to Energi TPA Basirih
 - Kabupaten Kotabaru tanggal 23 s.d 25 Februari 2021
Potensi investasi : Kawasan Industri Mekar Putih, Wisata Pulau Samber Gelap.
 - Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 03 s.d 04 Maret 2021
Potensi investasi : Bendungan Kusan
 - Kabupaten Barito Kuala tanggal 10 Maret 2021
Potensi investasi : peternakan sapi dan kebun jeruk
 - Kabupaten Tabalong tanggal 18 s.d 19 Maret 2021



-
- Potensi investasi : kawasan industri seradang
 - Kabupaten HSS tanggal 22 Maret 2021
Potensi investasi : kampong gabus dan desa wisata bambu
 - Kabupaten Balangan tanggal 12 s.d 13 April 2021
Potensi investasi : Perkebunan karet, wisata baruh bahinu, air terjun manyandar
 - Kabupaten HST tanggal 05 s.d 06 April 2021
Potensi investasi : wisata tandilang
 - Kabupaten HSU tanggal 19 s.d 20 April 2021
Potensi investasi : kerbau rawa dan kampong industri furniture
 - Kabupaten Tapin tanggal 15 September 2021
Potensi investasi : bendungan PLTA Tapin
4. Terlaksananya Kegiatan Rakor SIPID / Potensi Investasi Regional (PIR) Tanggal 11 November bertempat di Aula DPMPTSP Provinsi Kalimantan selatan, Yang di hadiri 50 peserta DPMPTSP kabupaten / kota se Kalimantan Selatan.
 5. Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke DPMPTSP Provinsi Joyjakarta Dalam Rangka Konsolidasi Mengenai Pemberian Insentif & Kemudahan PM, Sehubungan Dengan Telah Diterbitkannya Perda D.I Yogyakarta No. 7 TA 2020, Tentang Perubahan Atas Perda D.I Yogyakarta No. 4 TA 2013 Tentang Pemberian Insentif & Kemudahan PM. Dari Tanggal 04 November s.d 06 November 2021
 6. Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke DPMPTSP Provinsi Jawa Barat Rapat & Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Provinsi Kalimantan Selatan, Tentang Peningkatan Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Tanggal 09 November s.d 11 Desember 2021.



Program Promosi Penanaman Modal, dengan kegiatan:

a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan:

1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Promosi

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp424.832.000,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp352.820.050,-** atau 83.05% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini:

1.1 Tersedianya jumlah item media promosi sebanyak 6 item selama selama 1 tahun diantaranya:

- Buku potensi investasi kalimantan selatan
- Brosur
- Baliho
- Video
- Booklet
- Spanduk

1.2 Tersedianya 1 orang Pemetaan Sumber Daya Investasi yang difasilitasi jaminan sosial kesehatan (BPJS) non PNS selama 1 tahun

1.3 Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi pengembangan promosi se kabupaten/kota se-kalsel diantaranya:

1. Kabupaten Kotabaru dalam rangka Koordinasi Pengembangan Promosi se Kabupaten/Kota untuk data
2. Kabupaten Kotabaru dalam rangka Koordinasi Pengembangan Promosi se Kabupaten/Kota se – Kalsel ke DPMPTSP Kabupaten Kotabaru tanggal 24 – 26 Februari 2021
3. Kabupaten Batulicin dalam rangka Koordinasi Pengembangan Promosi se Kabupaten/Kota se – Kalsel ke



DPMPTSP Kabupaten Tanah Bumbu - Batulicin tanggal 24 – 25 Maret 2021

4. Kabupaten Tabalong – Tanjung dalam rangka Koordinasi Pengembangan Promosi se Kabupaten/Kota se – Kalsel untuk data peluang Investasi Tahun 2021 ke DPMPTSP Kabupaten Tabalong - Tanjung tanggal 7 – 8 April 2021
5. Kabupaten Kotabaru Dalam Rangka Koordinasi Pengembangan Promosi se Kabupaten/Kota se - kalsel ke DPMPTSP Kabupaten Kotabaru di Kotabaru tanggal 8 - 10 Desember 2021
6. Kabupaten Hulu Sungai Tengah – Barabai dalam rangka Koordinasi Pengembangan Promosi se Kabupaten/Kota se Kalsel untuk data Potensi Investasi Tahun 2021 ke DPMPTSP Kabupaten Hulu Sungai Tengah – Barabai tanggal 27 – 28 Mei 2021
7. Kabupaten Hulu Sungai Selatan – Kandangan Dalam Rangka Koordinasi Pengembangan Promosi se Kabupaten/Kota se Kalsel untuk data potensi Investasi Tahun 2021 ke DPMPTSP Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kandangan tanggal 22 November 2021 (Anggaran Perubahan)
8. Kabupaten Hulu Sungai Utara – Amuntai dalam rangka koordinasi Pengembangan Promosi se Kabupaten/Kota se Kalsel untuk data potensi investasi tahun 2021 ke DPMPTSP Kabupaten Hulu Sungai Utara – Amuntai tanggal 8-9 November 2021 (Anggaran Perubahan)
9. Kabupaten Tanah Laut – Pelaihari Dalam Rangka Koordinasi Pengembangan Promosi se Kabupaten/Kota se Kalsel untuk data potensi investasi tahun 2021 ke



DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut - Pelaihari tanggal 2 November 2021 (Anggaran Perubahan)

10. Kabupaten Tapin – Rantau dalam rangka Koordinasi Pengembangan Promosi se Kabupaten/Kota se – Kalsel untuk data potensi investasi tahun 2021 ke DPMPTSP Kabupaten Tapin - Rantau tanggal 1 November 2021 (Anggaran Perubahan)

11. Kabupaten Barito Kuala - Marabahan Dalam Rangka Koordinasi Pengembangan Promosi se Kabupaten/Kota se Kalsel untuk data potensi investasi tahun 2021 ke DPMPTSP Kabupaten Barito Kuala - Marabahan tanggal 19 November 2021(Anggaran Perubahan)

1.4 Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun

1.5 Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi/konsultasi

- DKI Jakarta dalam rangka Konsultasi Kesiapan Daerah Menindaklanjuti Pelaksanaan Promosi Dengan Pola Forum Bisnis Di BKPM RI 27 s/d 29 Januari 2021
- DKI Jakarta dalam rangka Konsultasi mengenai Forum Investasi ke BKPM RI di Jakarta tanggal 30 September s/d 2 Oktober 2021

2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp538.309.600,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp495.401.050,-** atau 92.03% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini:

1. Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun
2. Tersedianya alat bahan untuk kegiatan kantor selama 1 tahun
3. Terlaksananya konsultasi teknis persiapan pameran di dalam negeri Republik Indonesia dari tanggal 27 s/d 29 Mei 2021 ke



BKPM RI dengan harapan agar potensi-potensi unggulan yang ada di daerah Provinsi Kalimantan Selatan bisa menarik calon investor agar bisa berinvestasi di Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Terpasangnya Baliho Promosi Investasi dimedia promosi, berlokasi di Tol Sedyatmo KM 27+600 Bandara Soekarno-Hatta Jakarta) dan Jalan A. Yani Km 7 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Mengikuti beberapa pameran investasi/Walbinar di dalam negeri, yaitu:
 - a. Bank Indonesia bekerjasama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KIRI) Sydney dan Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) Sydney menyelenggarakan sharing session investasi dengan topik "Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Menarik Investor Australia Melalui Materi Penyusunan Investasi yang Tepat Sasaran"bersama DPM PTSP Kalsel Rabu, 28 Juli 2021.
 - b. Zoom Meeting Untuk Mengetahui dan Menggali Potensi Potensi serta Peluang Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan(DPMPTSP Prov.Kalsel) dengan Provinsi Anhui (China) Rabu, 25 Agustus 2021
 - c. Door To Door Promosi Investasi Daerah dengan PT.JHONLIN GROUP dan PT. ADARO INDONESIA di Jakarta Rabu, 25 November 2021.
 - d. Rapat Teknis Potensi Perdagangan dan Investasi di Pulau Kalimantan antara DPMPTSP Prov.Kalbar, DPMPTSP Prov.Kalteng, DPMPTS Prov.Kalsel, DPMPTSP Prov.Kaltim dan DPMPTSP Prov.Kaltara dengan Konsullat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinibalu(Malaysia), Jum;at 03 Desember 2021



6. Koordinasi dan Pengumpulan Bahan Promosi Investasi Daerah Ke 13 Kab/Kota se Kalimantan Selatan dari Bulan November sampai dengan Bulan Desember 2021
7. Terlaksananya kegiatan seminar sebanyak 3 kali diantaranya:
 - Rapat koordinasi potensi investasi kalimantan selatan
 - Forum investasi dengan tema Pertumbuhan Investasi Kalimantan Selatan Pasca Covid dengan Mendorong Pengembangan Investasi pada tanggal 25 November 2021
 - One on one meeting investor dan UMKN
8. Tersedianya 1 orang Pengelola Pameran dan Kemitraan yang difasilitasi jaminan sosial kesehatan (BPJS) non PNS selama 1 tahun
9. Terlaksananya Pameran Digital Indonesia Infrastrucure Week (IIVV) 2021 – Digital Expo dari tanggal 1 – 10 November 2021 dengan menggunakan platform digital, diikuti 34 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu se Indonesia, BUMN, BUMD dan Perusahaan Asing Perusahaan Dalam Negeri yang di koordinir oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.
10. Terlaksananya pameran JIATTEK (Jogya Invesment Agriculture Tourism Trade nad Export Commodity) 8th 2021 bertempat di Malioboro Mall dari tanggal 4 November 2021 sampai dengan 7 November 2021
11. Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pengumpulan bahan promosi investasi diantaranya: daerah kab/kota tersebut diantaranya seperti berikut :
 - Kota Banjarbaru yaitu Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan.
 - Kota Banjarmasin yaitu Sektor Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan dan Energy.



- Kabupaten Balangan yaitu Sektor Pariwisata, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan.
- Kabupaten Balangan yaitu Sektor Pariwisata, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan.
- Kabupaten Banjar yaitu Sektor pertanian, perdagangan, pengangkutan dan sektor jasa- jasa.
- Kabupaten Tapin yaitu Sektor pertanian, sektor perindustrian dan sektor pertambangan.
- Kabupaten Batola yaitu Sektor Kehutanan, Perkebunan , perikanan dan pariwisata.
- Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata
- Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu Sektor pertanian, jasa, perdagangan dan peternakan.
- Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata
- Kabupaten Kotabaru yaitu Sektor pertambangan, industri, pariwisata, peternakan dan pertanian
- Kabupaten Tanah Bumbu yaitu Sektor pertambangan, industri, pariwisata, peternakan, industri kreatif dan pertanian
- Kabupaten Tanah Laut yaitu Sektor pariwisata, pertambangan, pertanian, perkebunan dan pariwisata.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan kegiatan:

- a. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Provinsi, dengan sub kegiatan:
 1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp549.624.600,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp532.096.800,-** atau 96.81% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini:



- Tersedianya 14 (empat belas) orang Tenaga Kontrak Kegiatan dengan Klasifikasi Pengadministrasian Umum yang difasilitasi jaminan sosial kesehatan (BPJS) selama 1 (satu) Tahun
- Tersedianya 8 (delapan) orang Tenaga Kontrak Kegiatan dengan Klasifikasi Pengelolaan Sim Penanaman Modal yang difasilitasi jaminan sosial kesehatan (BPJS) selama 1 (satu) Tahun
- Tersedianya 2 (dua) orang Tenaga Kontrak Kegiatan dengan Klasifikasi Pengelolaan Pengaduan Publik yang difasilitasi jaminan sosial kesehatan (BPJS) selama 1 (satu) Tahun
- Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Rangka Rapat/Koordinasi/Konsultasi Teknis, dengan rincian sebagai berikut :
 - Ke Jakarta, dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat Persiapan Pelaksanaan SKM Wilayah 2, di Hotel Harris Suites FX Sudirman pada tanggal 22 – 24 Maret 2021.
 - Ke Jakarta, dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi ke Kementerian PAN RB pada tanggal 21 – 23 Juni 2021.
 - Ke Bandung, dalam rangka Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 9 – 11 Desember 2021

2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp18.423.800,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp8.445.000,-** atau 45.84% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini:

1. Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 3 kali diantaranya:



- ❖ Ke Tanjung (Tabalong) dalam rangka Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal Ke PT. PANCAR KARYA PERSADA pada tanggal 22 – 23 Juli 2021. Permasalahan yang dihadapi jaringan internet kurang stabil di daerah kabupaten tidak melanjutkan pemenuhan komitmen pada proses perizinan usaha dan izin komersil.
 - ❖ Ke Tanah Bumbu dalam rangka Pemantauan Pemenuhan Komitmen Penanaman Modal terhadap PT. Jala Trans Sinergi pada tanggal 26 – 27 Juli 2021. Permasalahan yang dihadapi perusahaan jaringan internet yang tidak stabil dan tidak melanjutkan proses pemenuhan komitmen terhadap izin usaha maupun izin lokasi.
 - ❖ Ke Kotabaru, dalam rangka Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal ke PT. Jaya Mandiri Sukses di Kotabaru pada tanggal 25 – 26 November 2021. Permasalahan yang dihadapi perusahaan proses penerbitan NIB karena belum migrasi ke OSS RB.
3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp87.286.200,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp73.752.650,-** atau 84.50% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini:
1. Terlaksananya Forum Konsultasi Publik pada tanggal 30 Juni 2021 di Aula Dpmpmts Prov. Kalsel
 2. Terlaksananya Belanja Cetak dan Penggandaan, dengan rincian sebagai berikut :
 - (1) Cetak dan Penggandaan
 - Tersedianya Buku Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2022.



- ☐ Tersedianya Buku Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2022.
- ☐ Tersedianya Brosur IKM.
- ☐ Tersedianya Banner X IKM.
- ☐ Tersedianya Buku Laporan Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat & Forum Konsultasi Publik Tahun 2022.

4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp755.682.500,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp524.655.600,-** atau 69.43% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini yakni terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan dengan belanja sebagai berikut:

1. Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun.
2. Tersedianya 2 (dua) orang Tenaga Kontrak Kegiatan dengan Klasifikasi Umum yang difasilitasi jaminan sosial kesehatan (BPJS) selama 1 (satu) Tahun
3. Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Gerai Perizinan Kab. /Kota Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 2 kali :
 - Kabupaten Tanah Bumbu Tanggal 17 s.d 19 Maret 2021
 - Kabupaten Tanah Laut Tanggal 23 Nopember 2021
4. Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke:
 - BKPM RI di Jakarta Dalam Rangka Konsultasi Perizinan Usaha Industri (Perizinan Perindustrian) yang Merupakan Kewenangan Dinas PMPTSP Prov. Kalsel Tanggal 7 s.d 9 April 2021
 - Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi tentang UU Nomor 3



Tahun 2020 sekaligus Tata Cara Penyerahan Dokumen sebagai Tindak Lanjut Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Tanggal 16 s.d 18 Juni 2021

- BKPM RI di Jakarta Dalam Rangka Konsultasi Perizinan Usaha Industri (Perizinan Perindustrian) yang Merupakan Kewenangan Dinas PMPTSP Prov. Kalsel Tanggal 7 s.d 9 April 2021
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Perizinan Kapal Perikanan Tanggal 20 s.d 22 Oktober 2021
- BKPM RI di Jakarta Dalam Rangka Konsultasi Perizinan Usaha Industri (Perizinan Perindustrian) yang Merupakan Kewenangan Dinas PMPTSP Prov. Kalsel Tanggal 7 s.d 9 April 2021
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi tentang UU Nomor 3 Tahun 2020 sekaligus Tata Cara Penyerahan Dokumen sebagai Tindak Lanjut Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Tanggal 16 s.d 18 Juni 2021

5. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Peninjauan Lapangan untuk syarat teknis perizinan :

1. Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebanyak 37 kali
 - Kabupaten Hulu Sungai Utara Peninjauan Lapangan Izin Kehutanan Tanggal 25 – 26 Februari 2021
 - Kabupaten Tanah Laut



1. Peninjauan Lapangan Izin Air Tanah Tanggal 22 Maret 2021,
2. Peninjauan Lapangan Izin Ketenagalistrikan Tanggal 2 Juni 2021
3. Peninjauan Lapangan Izin Air Tanah Tanggal 8 Juni 2021
4. Peninjauan Lapangan Izin Usaha Perkebunan Tanggal 10 Juni 2021
5. Peninjauan lapangan Izin Air Tanah Tanggal 8 Juli 2021
6. Peninjauan Lapangan Izin Perkebunan Tanggal 10 November 2021
- Kabupaten Tabalong
 1. Peninjauan Lapangan Izin Ketenagalistrikan Tanggal 21 – 23 April 2021
 2. Peninjauan Lapangan Izin Kehutanan Tanggal 26 – 27 Juli 2021
- Kota Banjarbaru
 1. Peninjauan Lapangan Izin Ketenagalistrikan Tanggal 23 April 2021
- Kabupaten Tanah Bumbu
 1. Peninjauan Lapangan Izin Kehutanan Tanggal 31 mei – 1 juni 2021
 2. Peninjauan Lapangan Izin Ketenagalistrikan Tanggal 3 – 4 Juni 2021
 3. Peninjauan Lapangan Izin Ketenagalistrikan Tanggal 13 -14 Juni 2021
 4. Peninjauan Lapangan Izin Ketenagalistrikan Tanggal 13 – 14 September 2021



-
5. Peninjauan Lapangan Izin Ketenagalistrikan Tanggal 13 – 14 September 2021
 - Kabupaten Kotabaru
 1. Peninjauan Lapangan Izin Ketenagalistrikan Tanggal 7 – 9 Juni 2021
 2. Peninjauan Lapangan Izin Ketenagalistrikan Tanggal 10 – 12 Juni 2021
 3. Peninjauan Lapangan Izin Air Tanah Tanggal 7 – 8 Desember 2021
 - Kabupaten Barito Kuala
 1. Peninjauan Lapangan Izin Kehutanan Tanggal 17 Juni 2021
 - Kabupaten Banjar
 1. Peninjauan Lapangan Izin Air Tanah Tanggal 18 Juni 2021
 2. Peninjauan Lapangan Izin Air Tanah Tanggal 23 Agustus 2021
 3. Peninjauan Lapangan Izin Air Tanah Tanggal 8 September 2021
 4. Peninjauan Lapangan Izin Air Tanah Tanggal 6 Desember 2021
 - Kota Banjarmasin
 1. Peninjauan Lapangan Izin Ketenagalistrikan Tanggal 24 Juni 2021
 2. Peninjauan Lapangan Izin Pariwisata Tanggal 2 Juli 2021
 3. Peninjauan Lapangan Izin Ketenagalistrikan Tanggal 9 Juli 2021
 4. Peninjauan Lapangan Izin Ketenagalistrikan Tanggal 17 September 2021



-
5. Peninjauan Lapangan Izin Ketenagalistrikan Tanggal 20 September
 6. Peninjauan Lapangan Izin Air Tanah Tanggal 22 November 2021
 - Kabupaten Balangan
 1. Peninjauan Lapangan Izin Kehutanan Tanggal 8 – 9 November 2021
 - Kabupaten Tapin
 1. Peninjauan Lapangan Izin Air Tanah Tanggal 6 Juli 2021
 2. Peninjauan Lapangan Izin Air Tanah Tanggal 12 Juli 2021
 3. Peninjauan Lapangan Izin Air Tanah Tanggal 4 Agustus 2021
 4. Peninjauan Lapangan Izin Air Tanah Tanggal 7 September 2021
 5. Peninjauan Lapangan Izin Ketenagalistrikan 16 September 2021
 - Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 1. Peninjauan Lapangan Izin Air Tanah Tanggal 2 Desember 2021
 2. Peninjauan Lapangan Izin Ketenagalistrikan 17 Desember 2021
 6. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Evaluasi Pendataan Realisasi Jumlah Perizinan/Nonperizinan Kab/Kota se Kalimantan Selatan tahun 2021 Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
 - Kabupaten Tanah Laut Tanggal 12 November 2021
 - Kabupaten Kotabaru Tanggal 10 – 12 November 2021 dan 14 – 16 Desember 2021



- Kabupaten Barito Kuala Tanggal 12 November 2021
- 6. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Evaluasi Pendataan Realisasi Jumlah Perizinan/Nonperizinan Kab/Kota se Kalimantan Selatan Infrastruktur dan Sosial sebanyak 41 kali di 13 Kab/ kota.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan kegiatan:

a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dengan sub.kegiatan:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp107.077.400,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp70.357.900,-** atau 65.71% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini:

- a. Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun.
- b. Terlaksananya Kegiatan Rapat Percepatan Realisasi Penanaman Modal
 - Rapat Percepatan Realisasi Penanaman Modal Tahun 2021 yang bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, Jl. Bangun Praja, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kel. Cempaka, Kec. Cempaka, Kota Banjarmasin pada tanggal 07 Oktober 2021.
 - Rapat Percepatan Realisasi Penanaman Modal Tahun 2021 yang bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, Jl. Bangun Praja, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kel. Cempaka, Kec. Cempaka, Kota Banjarmasin pada tanggal 19 November 2021.
- c. Tersedianya Iklan/reklame, Film dan Pemetretan (Koran Banjarmasin Post PT. Grafika Wangi Kalimantan) pada sub



kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal tanggal 6 Agustus dan 26 Oktober 2021.

- d. Kunjungan lapangan dalam rangka Pemantauan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) se Kalimantan Selatan (DAK) dengan total kunjungan Pemantauan sebanyak 8 Perusahaan yaitu;
1. Ke Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 23 Maret 2021 pada perusahaan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
 2. Ke Kabupaten Tabalong pada tanggal 29 s.d 30 Maret 2021 pada perusahaan PT. Green Planet Indonesia.
 3. Ke Kabupaten Balangan pada tanggal 30 s.d 31 Maret 2021 pada Perusahaan PT. Satria Rara Pramitha.
 4. Ke Kota Banjarmasin pada tanggal 9 April 2021 pada perusahaan PT. Pelayaran Teladan Makmur Jaya.
 5. Ke Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 13 April 2021 pada perusahaan PT. IDS Elite.
 6. Ke Kabupaten Banjar pada tanggal 21 April 2021 pada perusahaan PT. Mandiri Wijaya Utama.
 7. Ke Kota Banjarbaru pada tanggal 18 Mei 2021 pada perusahaan PT. Dana Kharisma.
 8. Ke Kabupaten Tabalong pada tanggal 14 s.d 15 Juni 2021 pada perusahaan PT. Pancar Karya Persada.
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp531.917.300,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp356.804.050,-** atau 67.08% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini :

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2021 yang bersumber APBD Murni telah melaksanakan berbagai aktivitas antara lain dengan



mengadakan kunjungan lapangan dalam rangka mendata dan menginventarisir permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha baik itu penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri serta perjalanan ke luar daerah dan melaksanakan FGD Fasilitasi Permasalahan dengan tema “Mencari Solusi Terbaik Bagi Perusahaan di Kabupaten Tanah Laut, Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

2.1. Kunjungan lapangan dalam rangka Pembinaan proyek Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang masuk Debottle Necking di Kalimantan Selatan

1. Ke Kabupaten Kotabaru pada tanggal 17 s.d. 19 Februari 2021 pada perusahaan PT. Sumber Daya Energy dan PT. Qinfu Mining Industry.
2. Ke Kota Banjarmasin pada tanggal 26 Februari 2021 pada perusahaan PT. Terminal Logistik Makmur Indonesia.
3. Ke Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 04 s.d 05 Maret 2021 pada perusahaan PT. Maming Pelabuhan.
4. Ke Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 17 Maret 2021 pada perusahaan PT. Delta Prima Steel.
5. Ke Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 14 April 2021 pada perusahaan PT. Semeru Surya Steel.
6. Ke Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 9 Desember 2021 pada DPMPTSP Kab. Tanah Laut
7. Ke Kota Banjarmasin pada tanggal 10 Desember 2021 pada Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Selatan

2.2. Perjalanan Dinas Luar Daerah

1. Dalam rangka menghadiri Rapat Konsolidasi Perkembangan Data Realisasi Penanaman Modal Tahun 2021 yang bertempat di Hotel Alila Solo dengan petugas pelaksana H.



M. Mulyadi, SE, ME; Norlina Hayati, SE, S.Ak; dan Fatmah pada tanggal 04 s.d. 06 Nopember 2021.

2.3. FGD Fasilitasi Permasalahan

Tema “Mencari Solusi Terbaik Bagi Perusahaan di Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 29 Nopember 2021 dengan menghadirkan perusahaan bijih besi beserta instansi terkait yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kab. Tanah Laut

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2021 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus telah melaksanakan berbagai aktivitas antara lain :

- a. Bimtek LKPM Online yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2021 di Hotel NASA Banjarmasin, tanggal 3 Juni 2021 di Hotel Banjarmasin Internasional dan tanggal 6 Nopember 2021 di Hotel Banjarmasin Internasional
- b. Sosialisasi Kemitraan Berusaha yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2021 di Hotel NASA dan 10 Juni 2021 di Hotel Banjarmasin Internasional
- c. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2021 dan 17 Juni 2021 di Hotel Novotel
- d. Bimtek OSS RBA yang dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 Nopember 2021 di Hotel Novotel

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp233.277.800,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp158.037.600,-** atau 67.75% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini:

- ❖ Kunjungan lapangan dalam rangka Pengawasan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Usaha Kecil Menengah (UKM



)se Kalimantan Selatan (DAK), total kunjungan pengawasan sebanyak 36 Perusahaan yaitu:

1. Ke Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 22 Maret 2021 pada perusahaan PT. Infrastruktur Terbarukan Kusuma.
2. Ke Kota Banjarmasin pada tanggal 8 April 2021 pada perusahaan PT. Insan Bonafide.
3. Ke Kabupaten Tapin pada tanggal 8 April 2021 pada perusahaan PT. Bhumi Rantau Energi.
4. Ke Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 9 April 2021 pada perusahaan PT. Batola Primatama.
5. Ke Kota Banjarmasin pada tanggal 13 April 2021 pada perusahaan PT. Manata Gawi Sabumi.
6. Ke Kabupaten Banjar pada tanggal 14 April 2021 pada perusahaan PT. Warga Alumni Darussalam.
7. Ke Kota Banjarbaru pada tanggal 23 April 2021 pada perusahaan PT. Varia Inti Tirta.
8. Ke Kota Banjarmasin pada tanggal 18 Mei 2021 pada perusahaan PT. Sembilan Raksa Dinamika.
9. Ke Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 20 Mei 2021 pada perusahaan PT. Gouka Indo Energy.
10. Ke Kabupaten Banjar pada tanggal 21 Mei 2021 pada perusahaan PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk.
11. Ke Kota Banjarbaru pada tanggal 25 Mei 2021 pada perusahaan PT. Samator Gas Industri.
12. Ke Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 25 Mei 2021 pada perusahaan PT. Tri Industri Alami.
13. Ke Kabupaten Balangan pada tanggal 10 s.d 11 Juni 2021 pada perusahaan PT. Paringin Indah Balangan.
14. Ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 11 Juni 2021 pada perusahaan PT. Surya Langgeng Sejahtera.



15. Ke Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 15 s.d 17 Juni 2021 pada perusahaan PT. Batulicin Nusantara Maritim Tbk.
16. Ke Kabupaten Kotabaru pada tanggal 16 s.d 18 Juni 2021 pada perusahaan PT. Armada Putra Nusantara.
17. Ke Kabupaten Kotabaru pada tanggal 22 s.d 24 Juni 2021 pada perusahaan PT. Fajar Agro Sejahtera.
18. Ke Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 23 s.d 25 Juni 2021 pada perusahaan PT. Fass Forest Development.
19. Ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 22 s.d 23 Juni 2021 pada perusahaan PT. Pantai Berkat Utama.
20. Ke Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 28 s.d 29 Juni 2021 pada perusahaan PT. Persada Dinamika Lestari.
21. Ke Kabupaten Tabalong pada tanggal 28 s.d 29 Juni 2021 pada perusahaan PT. Elbana Abadi Jaya.
22. Ke Kota Banjarmasin pada tanggal 16 Juli 2021 pada perusahaan PT. AKR Corporindo Tbk.
23. Ke Kabupaten Kotabaru pada tanggal 21 s.d 23 Juli 2021 pada perusahaan PT. Restu Mukti Sejati.
24. Ke Kabupaten Tapin pada tanggal 22 Juli 2021 pada perusahaan PT. Intan Banjar Jaya Utama.
25. Ke Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 22 s.d 23 Juli 2021 pada perusahaan PT. Rahman Jaya Rentalindo.
26. Ke Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Juli 2021 pada perusahaan PT. Catur Mitra Sentosa.
27. Ke Kabupaten Tabalong pada tanggal 12 s.d 13 Agustus 2021 pada perusahaan PT. Bhakti Mandiri Putera.
28. Ke Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 18 Agustus 2021 pada perusahaan PT. Sukses Wijaya Adimakmur.
29. Ke Kabupaten Balangan pada tanggal 18 s.d 19 Agustus 2021 pada perusahaan PT. Aulia Artania Alika.



30. Ke Kota Banjarbaru pada tanggal 24 Agustus 2021 pada perusahaan PT. Nusantara Jaya Raya Mujur.
31. Ke Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 26 Agustus 2021 pada perusahaan PT. Sumber Rezeki Perdana.
32. Ke Kabupaten Tabalong pada tanggal 15 s.d 16 September 2021 pada perusahaan PT. Tabalong Makmur.
33. Ke Kabupaten Balangan pada tanggal 16 s.d 17 September 2021 pada perusahaan PT. Sanggam Balangan Makmur.
34. Ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 29 September 2021 pada perusahaan PT. Qianna Sumber Tama.
35. Ke Kabupaten Kotabaru pada tanggal 26 s.d 28 Oktober 2021 pada perusahaan PT. Cahaya Ujung Belingkar.
36. Ke Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 27 s.d 28 Oktober 2021 pada perusahaan PT. Gawi Makmur Kalimantan.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan kegiatan:

- a. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi, dengan sub. Kegiatan:

1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp268.242.800,-**. Serapan keuangan sebesar **Rp225.455.950,-** atau 84.05% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini:

- 1) Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah rangka Pemutakhiran Data dan Informasi Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.
 - ☐ Kabupaten Balangan tanggal 10-11 Februari 2021
 - ☐ Kabupaten Tabalong tanggal 18-19 Februari 2021



-
- ☐ Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 25-26 Februari 2021
 - ☐ Kabupaten Tapin tanggal 3 Maret 2021
 - ☐ Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 9-10 Maret 2021
 - ☐ Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 16 Maret 2021
 - ☐ Kabupaten Banjar tanggal 19 April 2021
 - ☐ Kota Banjarbaru tanggal 20 April 2021
 - ☐ Kota Banjarmasin tanggal 22 April 2021
 - ☐ Kabupaten Tanah Laut tanggal 20 Mei 2021
 - ☐ Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 27-28 Mei 2021
 - ☐ Kabupaten Kotabaru tanggal 9-11 Juni 2021
 - ☐ Kabupaten Barito Kuala tanggal 25 Juni 2021
- 2) Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah
- ☐ BKPM RI dalam rangka Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pengembangan Data dan Informasi ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) di Jakarta tanggal 29-31 Maret 2021
 - ☐ Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi Pengembangan Aplikasi SIMAPAN di Bandung tanggal 18-20 Oktober 2021
 - ☐ BKPM RI dalam rangka Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pengembangan Data dan Informasi ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) di Jakarta tanggal 1-3 Desember 2021
- 3) Tersedianya 1 Orang Pengolah Data Kegiatan yang difasilitasi jaminan sosial kesehatan (BPJS) non PNS selama 1 tahun.
- 4) Terlaksananya Kegiatan :
- ☐ Sosialisasi Data terkait pengelolaan data yang ada di BKPM berupa portal NSWI atau National Single Windows for investment bertempat di Aula Dinas PMPTSP Prov KALSEL tanggal 24 Juni 2021



-
- Bimbingan Teknis Online Single Submission Berbasis Risiko atau OSS Risk Based Management (OSS RBA) sebanyak dua kali dengan menggunakan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) bertempat di Ruang Galam Hotel Novotel Banjarmasin Airport di Banjarbaru tanggal 24 dan 25 November 2021.



BAB IV

ALOKASI, REALISASI ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Alokasi dan realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi	Anggaran		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Realisasi
- Belanja Daerah			
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi:	Rp 11.743.790.392,-	Rp11.581.151.192,-	Rp9.384.638.509,-
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal :	Rp 456.375.900,-	Rp456.375.900,-	Rp345.182.150,-
- Program Promosi Penanaman Modal	Rp 963.141.600,-	Rp963.141.600,-	Rp848.221.100,-
- Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 1.163.635.100,-	Rp1.411.017.100	Rp1.138.950.050,-
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 872.272.500,-	Rp872.272.500,-	Rp585.199.550,-



- Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 233.277.800,-	Rp268.242.800,-	Rp225.455.950,-
Jumlah	<u>Rp15.411.761.292,-</u>	<u>Rp15.552.201.092,-</u>	<u>Rp12.527.647.309,-</u>

B. Pendapatan Daerah

<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
<u>Rp225.000.000</u>	<u>Rp90.558.000,-</u>



BAB V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Tahunan ini memuat uraian kegiatan yang diselenggarakan selama tahun 2022 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, dengan acuan program yang disusun yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Kesepakatan atau Kontrak Kerja dengan Gubernur Kalimantan Selatan dalam rangka *Good Governance*.

Terlaksananya kegiatan dan program karena adanya dukungan dan koordinasi dari instansi terkait dan kesiapan personil internal SKPD. Meskipun terdapat beberapa permasalahan dan hambatan, namun dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya sehingga pembinaan iklim investasi di daerah ini terselenggara dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari segi alokasi pendanaan tidak seluruhnya terealisasi dalam akhir tahun anggaran, hal ini dilakukan dalam upaya efisiensi dengan tetap mengoptimalkan kinerja.

B. SARAN

Hasil yang telah dicapai dalam Tahun 2022 dan berbagai upaya pemecahan permasalahan, hendaknya menjadi bahan evaluasi dan rencana peningkatan kinerja tahun yang akan datang bagi seluruh jajaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Demikian pula beberapa kekurangan yang terjadi sebagai umpan balik untuk lebih memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan perencanaan, keuangan dan aset kegiatan pada Tahun 2021 dan selanjutnya.